MEMBUKA KUNCI PENURUNAN STUNTING MELALUI REFORMASI BIROKRASI DI KABUPATEN CIAMIS

Penulis: Candra Setya Nugroho, Marifa Ayu Kencana, dan Toni Syarif

Excutive Summary

Kondisi stunting nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi stunting di daerah. Salah satunya adalah kondisi stunting Kabupaten Ciamis yang perlu mendapatkan perhatian karena mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir ini. Berdasarkan hasil survei SSGI (Studi Status Gizi Indonesia), angka atau prevalensi stunting di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 naik menjadi 25,4%, naik 6,8% dari Tahun 2022 sebesar 18,6%.

Untuk percepatan penurunan stunting maka pemerintah melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang difokuskan pada penurunan angka stunting" hingga Tahun 2024. Dalam pelaksanaannya, Tahun 2023 ada permasalahan yang dihadapi di Kabupaten Ciamis yaitu masalah perencanaan atau penyusunan rencana aksinya. Perencanaan (rencana aksi) yang disusun kurang implementatif dan proses penyusunannya belum melibatkan stakeholder terkait. Oleh karena itu direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penguatan kapasitas Tim RB Tematik melalui pengembangan kompetensi yang tepat, penguatan kolaborasi dengan seluruh stakeholder, dan penguatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB dalam penyusunan perencanaan (rencana aksi) RB Tematik.

Pendahuluan

Salah satu permasalahan utama yang menjadi fokus perhatian pemerintah untuk segera diatasi adalah penurunan stunting. Kondisi stunting di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan.

Indeks Ketahanan Pangan Global Tahun 2022 menempatkan Indonesia pada peringkat 84 untuk ketersediaan pangan dan 44 untuk keterjangkauan. Angka ini lebih rendah dari negara tetangga seperti Thailand (77 dan 39), Vietnam (49 dan 38), dan Malaysia (56 dan 30) dari 113 negara (Kumparan, 2023). Berdasarkan hasil riset Center for Indonesian Studies (CIPS) Tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 21 juta masyarakat atau setara 7% dari total populasi penduduk Indonesia, kekurangan gizi dengan asupan kalori per kapita harian di bawah standar Kementerian Kesehatan sebesar 2.100 kkal (Firdaus&Ely, 2023).

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada Tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun sebanyak 2,8% dibandingkan pada Tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%. Meskipun mengalami penurunan, namun penurunan sebesar 2,8% tersebut kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,4% per tahun. Capain ini belum optimal, mengingat target prevalensi stunting di Tahun 2024 sebesar 14% dan standard WHO di bawah 20%.

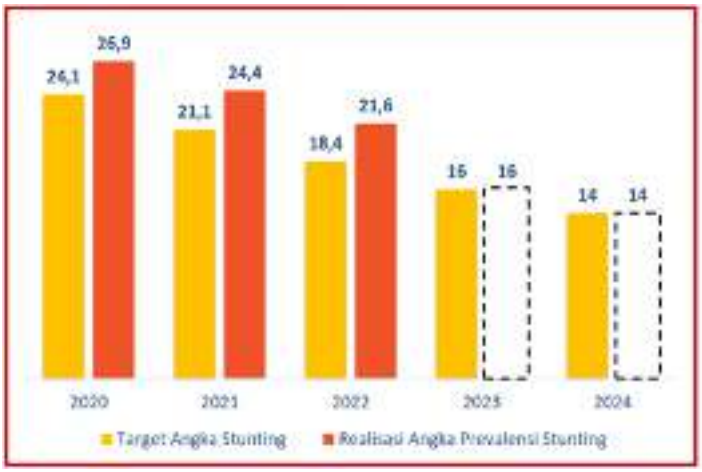

Gambar. Grafik Data Stunting Indonesia
Sumber data: SSGi Kementerian Kesehatan, 2022

Percepatan penurunan stunting pada anak balita merupakan salah satu agenda utama Pemerintah Indonesia. Pemerintah memandang bahwa sebagai upaya mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya pada Tujuan 2, yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, perlu dilakukan percepatan penurunan stunting.

Tahun 2024 adalah tahun keenam pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018 dan juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2022, prevalensi stunting terus menunjukkan tren penurunan. Dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,8%, maka untuk mencapai target di tahun 2024 prevalensi stunting harus dapat diturunkan sebesar 7,6% dalam 2 tahun ke depan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program dalam 2 tahun ke depan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting adalah gizi buruk pada ibu dan anak. Kurangnya asupan gizi pada ibu sejak sebelum hamil, selama kehamilan, dan pada 1.000 hari pertama kehidupan anak dapat menghambat pertumbuhan mereka. Ini menyebabkan tingginya angka stunting di Indonesia. Masalah ekonomi juga berperan penting karena keluarga dengan pendapatan rendah memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi, sehingga anak-anak mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Ketimpangan ekonomi juga memperburuk situasi ini karena hanya sedikit orang yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kesempatan (Kemenkes, 2022).

Gambar. Grafik Perbandingan Angka Stunting Kabupaten Ciamis Tahun 2021 - Tahun 2023
Sumber data: SSGi Kementerian Kesehatan, 2024

Kondisi stunting nasional sangat dipengaruhi oleh kondisi stunting di daerah. Salah satunya adalah kondisi stunting Kabupaten Ciamis saat ini masih perlu mendapatkan perhatian karena mengalami kenaikan yang signifikan pada beberapa tahun terakhir. Berdasarkan hasil survei SSGI (studi status gizi Indonesia), angka atau prevalensi stunting di Kabupaten Ciamis Tahun 2023 naik menjadi 25,4% di mana pada Tahun 2022 sebesar 18,6%. Padahal angka stunting di Kabupaten Ciamis pada Tahun 2021 hanya sebesar 16%.

Angka stunting Kabupaten Ciamis Tahun 2023 (25,4) berada di atas rata-rata provinsi 21,7% dan nasional 21,5%. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian yang serius bagi Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk melakukan peningkatan upaya dalam penanganan stunting di Kabupaten Ciamis.

Gambar. Grafik. Perbandingan Angka Stunting Kabupaten Ciamis dengan Target Provinsi dan Nasional
Sumber data: Diolah, 2024

Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyebutkan ada beberapa faktor kritis yang mempengaruhi angka stunting yaitu kualitas kesehatan ibu dan anak, kebiasaaan pola hidup bersih sehat masyarakat, mutu fasilitas kesehatan, dan pemanfaatan sistem informasi stunting yang terintegrasi (Kemenpan RB, 2023). Khususnya terkait faktor terakhir, maka salah satu fokus RB Tematik Tahun 2023 hingga Tahun 2024 adalah Digitalisasi Administrasi Pemerintahan yang difokuskan pada penurunan angka stunting. Pengelolaan dan pemanfaatan data melalui digitalisasi diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan yang tepat untuk penurunan angka stunting di daerahnya.

Permasalahan

Reformasi birokrasi tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting Tahun 2023" di Kabupaten Ciamis masih belum optimal. Hal itu sesuai dengan hasil evaluasi RB yang dilakukan oleh Kemenpan RB Tahun 2023 pada 3 aspek penilaiannya yaitu aspek rencana aksi, capaian output dan capaian dampak.

Tabel. Hasil Evaluasi RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting " 2023 Kabupaten Ciamis

Aspek Penilaian	Kabupaten Ciamis
Rencana Aksi	Bobot: 0.4 Skor: 0.23 Skor Index: 0.23
Capaian Output	Bobot: 0.6 Skor: 97.65 Skor Index: 0.34
Capaian Dampak	Bobot: 3 Skor: 0.75 Skor Index: 0.75

Sumber: LHE RB Kabupaten Ciamis (Kemenpan RB, 2023)

Tabel. Catatan Aspek Rencana Aksi RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Fokus Penanganan Stunting " 2023 Kabupaten Ciamis

1. Penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait
2. Indikator Sasaran Keberhasilan RB Tematik Instansi Pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan
3. Perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan Cukup
4. Kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi
5. Rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan

Sumber: LHE RB Kabupaten Ciamis (Kemenpan RB, 2023)

Berdasarkan hasil penilaian RB Tahun 2023 khususnya terkait "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting" pada Kabupaten Ciamis terdapat beberapa temuan. Temuan tersebut khususnya pada aspek rencana aksi dimana masih ada beberapa aspek perencanaan yang belum optimal atau masih ditemukan beberapa kelemahan.

Berdasarkan data LHE RB Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dan hasil wawancara dengan Tim RB Ciamis maka dapat ditemukan bahwa ada 2 permasalahan utama yang mempengaruhi kualitas perencanaan (rencana aksi) RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting" pada Kabupaten Ciamis yaitu:

Perencanaan (rencana aksi) RB Tematik kurang implementatif

Dokumen rencana aksi yang sudah disusun masih belum implementatif mendukung pelaksanaan RB tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting". Hal itu dapat dilihat dari banyaknya catatan pada dokumen rencana aksi yang sudah disusun (Hasil LHE RB dari Kemenpan RB), antara lain penetapan sasaran belum sepenuhnya menjawab permasalahan utama pada tema terkait, indikator sasaran keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah belum mampu menjawab sasaran yang ditentukan, perumusan indikator belum memenuhi kriteria SMART dan cukup, rencana aksi yang disusun belum sepenuhnya secara logis mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi pemerintah, dan kualitas rencana aksi belum memenuhi sebagian besar dari aspek perencanaan & penganggaran, proses bisnis & SOP, SDM, pengawasan, teknologi informasi, dan inovasi.

Penyusunan rencana aksi di Kabupaten Ciamis disusun oleh Tim RB Tematik. Tahun 2023 merupakah tahun pertama pelaksanaan RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting" sehingga Tim RB Tematik tersebut masih belum mempunyai pengalaman dalam penyusunan dokumen perencaannya (rencana aksi). Selain itu Tim RB Tematik terdiri dari beberapa jabatan yang berasal dari berbagai perangkat daerah sehingga mempunyai kompetensi yang berbeda-beda, khususnya terkait kompetensi penyusunan dokumen perencanaan. Hal ini mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan yang disusun oleh Tim RB Tematik yang masih belum implementatif.

Penyusunan perencaaan (rencana aksi) RB Tematik tidak melibatkan Stakeholder

Tim RB Tematik belum melibatkan stakeholder dalam menyusun perencanaan (rencana aksi) RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (fokus penurunan stunting)". Hal itu dapat dilihat dari catatan pada dokumen perencanaan yang diindikasikan pada rencana aksi belum memuat kolaborasi dengan instansi pemerintah lainnya, khususnya kolaborasi dengan instansi pemerintah yang memiliki mandat khusus terkait pelaksanaan tema, dan atau stakeholder eksternal di luar pemerintahan.

Tahun 2023 merupakah tahun pertama pelaksanaan RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting", dalam penyusunan perencanaan (rencana aksi) hanya dilakukan oleh Tim RB Tematik yang terdiri dari unsur pemerintah saja. Penyusunan perencaan (rencana aksi) belum optimal karena tidak melibatkan seluruh stakeholder terkait, yaitu dari unsur masyarakat, akademisi, sektor swata, dan media. Penyelesaian masalah stunting tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah melainkan harus melibatkan semua pihak agar dapat berjalan optimal, termasuk dalam penyusunan perencaannya. Perencanaan yang tidak partisipatif akan menghasilkan target yang ditetapkan kurang akurat dan dampak selanjutnya adalah proses implementasinya kurang optimal. Kualitas perencanaan dipengaruhi oleh salah satunya adalah keterlibatan stakeholder (partisipatif) (Saifuddin, 2022).

Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan (rencana aksi) RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting" pada Kabupaten Ciamis maka diperlukan penguatan kapasitas Tim RB Tematik dan pelibatan stakhelder terkait. Untuk melakukan upaya tersebut maka direkomendasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis untuk dapat melakukan:

Penguatan kapasitas Tim RB Tematik terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan (Rencana Aksi RB) melalui Pengembangan Kompetensi

Kualitas perencanaan (rencana aksi) RB tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting" sangat ditentukan oleh kapasitas Tim RB Tematik yang menyusunnya. Untuk meningkatkan kapastitas Tim RB Tematik tersebut perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM-nya. Peningkatan kompetensi bisa dilakukan dengan beberapa program pengembangan kompetensi. Dengan mengikuti pengembangan kompetensi penyusunan perencanaan maka diharapkan dapat meningkatkan kapasitas Tim RB Tematik dalam menyusun perencanaan (rencana aksi). Oleh karena itu pemerintah daerah harus mendorong penguatan kapasitas Tim RB Tematik melalui pengembangan kompetensi SDM-nya agar kualitas dokumen rencana aksi RB Tematik meningkat.

Penguatan Kolaborasi antara Pemerintah dan Stakeholder dalam penyusunan Perencanaan

Permasalahan stunting tidak bisa hanya diselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan harus melibatkan semua pihak (stakeholder) atau dikenal dengan istilah pentahelix, yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat, penguasaha (swasta), dan media. Pelibatan stakeholder tersebut harus mulai dari proses penyusunan perencanaan. Pelibatan stakeholder dalam penyusunan rencana aksi RB Tematik akan meningkatkan kualitas dokumen rencana aksi karena dihasilkan melalui berbagai masukan dari seluruh pihak yang terkait. Penetapan target akan semakin akurat dan pembagian peran masing-masing pihak dalam pencapaian target tersebut akan semakin jelas.

Penguatan koordinasi dalam penyusunan Perencanaan antara Tim RB Tematik Kabupaten/ Kota dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB

Selain melakukan penguatan kapasitas Tim RB Tematik dan pelibatan stakeholder, diperlukan penguatan koordinasi dengan instansi vertikal dalam penyusunan perencanaan RB Tematik "Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus Penanganan Stunting". Penguatan komunikasi dan koordinasi perlu dilakukan oleh Tim RB Tematik (Pemerintah Kabupaten Ciamis) dengan instansi terkait, misalnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dengan adanya komunikasi dan koordinasi tersebut, diharapkan dokumen perencanaan RB Tematik akan mendapatkan asistensi dari instansi terkait sehingga dapat lebih meningkatkan kualitasnya.

Strategi Implementasi

1. Tim RB Tematik Kabupaten Ciamis harus proaktif mencari informasi terkait program peningkatan kompetensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (rencana aksi) dan mengajukan usulan kepada Pimpinan untuk diikutsertakan dalam program tersebut;
2. Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi Tim RB Tematik untuk mengikuti program peningkatan kompetensi terkait penyusunan dokumen perencanaan (rencana aksi);
3. Tim RB Tematik melakukan identifikasi stakeholder terkait RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting”, baik dari unsur pemerintah, akademisi, pengusaha/swasta, masyarakat dan media, kemudian mengajak mereka untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan (dokumen rencana aksi);
4. Tim RB Tematik bersama-sama stakeholder menyusun perencanaan RB Tematik “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan fokus penurunan stunting” mulai dari penetapan sasaran, indikator, rencana aksi dan target serta peran masing-masing pihak dalam mencapai target yang telah ditetapkan tersebut;
5. Tim RB Tematik melakukan koordinasi dan komunikasi kepada instansi terkait, antara lain Pemda Provinsi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PANRB untuk meminta asistensi terhadap dokumen perencanaan yang telah disusun.

Daftar Pustaka

- Firdaus, Ahmad. Ely Nurhayati.2023.”Future Food Demand in Poor Indonesian Districts”.Jakarta.CIPS (Center for Indonesian Policy Studies)
- Hermansyah, Dadang.20 Agustus 2023.”Angka Stunting di Ciamis Kembali Naik Jadi 18,6 Persen”. Diakses pada 7 Mei 2024.https://www.detik.com/jabar/berita/d-6895623/angka-stunting-di-ciamis-kembali-naik-jadi-18-6-persen.
- Kementerian Kesehatan RI.14 September 2022.“Faktor-faktor Penyebab Kejadian Stunting pada Balita”.https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1529/faktor-faktorpenyebab-kejadian-stunting-padabalita, diakses 12 Juni 2024
- Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.2023.”Modul RB Tematik Digitalisasi Administrasi Pemerintahan” Penanganan Stunting”. Diakses pada 7 Mei 2024. https://www.youtube.com/watch?v=Rxi0jW5l6RA
- Kumparan Bisnis.9 Juli 2023.“Riset CIPS: 21 Juta Orang Indonesia Kurang Gizi, 21,6 Persen Balita Stunting”.Diakses pada 7 Mei 2024. https://kumparan.com/kumparanbisnis/riset-cips-21-juta-orang-indonesia-kurang-gizi-21-6-persen-balita-stunting-20l50VJpLt4/full
- Kementerian Sekretariat Negara RI.30 September 2023.”Hasil Perhitungan IKPS Nasional dan Provinsi Tahun 2022”.Diakses pada 7 Mei 2024. https://stunting.go.id/hasil-perhitungan-ikps-nasional-dan-provinsi-tahun-2022/
- Saifuddin, Ridwan. Irma Nurachmi.Decky Ferdiansyah.2022. Kualitas Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.Inovasi Pembangunan-Jurnal Kelitbangan-Volume 10 No. 3 Tahun 2022

Dokumen dan Peraturan

- Dokumen Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018
- Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kabupaten Ciamis yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
- Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting

POLICY BRIEF

Membuka Kunci Penurunan Stunting Melalui Reformasi Birokrasi di Kabupaten Ciamis

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSLATBANG PKASN

Jalan Kiara Payung KM 4,7 Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat

Untuk informasi lebih lanjut :
0857-2353-2423

www.bandung.lan.go.id
puslatbangpkasn_lan
puslatbang PKASN LAN